

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran penting penerapan *Corporate Governance* dapat dilihat dari sisi salah satu tujuan penting didalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut. Untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional sebagai manajer. Manajemen perusahaan harus berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui kewenangan yang diberikan dalam membuat kebijakan dalam perusahaan.

Namun, dilain pihak manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima (Jensen dan Meckling, 1976). Jika manajer melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana hubungan antara *stakeholder* dan manajer

perusahaan, dan memahami bagaimana *corporate governance* bekerja didalam perusahaan tersebut. Sehingga tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya dan memakmurkan pemilik perusahaan atau pemegang saham dapat dicapai dengan baik.

Corporate governance menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan konsep *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lebih lanjut IICG mendefinisikan pengertian mengenai *Corporate Governance* yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa *Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mana mekanisme tersebut terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Bukhori, 2012).

Mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (Hapsari, 2011).

Penerapan CG yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus kepercayaan investor (OECD, 2004). Peningkatan penerapan CG menjadi kebutuhan yang mendasar sebab investasi akan mengikuti sektor yang mengadopsi standar tata kelola efisien (OECD, 2004). Perusahaan yang menerapkan CG seharusnya memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Dalam kerangka dasar Corporate Governance, implementasi prinsip-prinsip CG tergantung atas 3 (tiga) pilar penting, yaitu internal control yang kuat, internal audit yang independen dan eksternal audit yang memberikan feedback terhadap efektifitas dari proses internal control yang ada di dalam perusahaan. Untuk menunjang keefektifan ketiga pilar tersebut, peran Komite Audit sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris juga harus efektif dan dioptimalkan.

Melihat kesadaran perusahaan-perusahaan akan pentingnya kualitas penerapan prinsip-prinsip CG yang semakin meningkat, seharusnya kebutuhan akan Komite Audit juga semakin meningkat. Namun sayangnya, pemahaman akan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit sampai saat ini terasa masih sangat bervariasi. Beragamnya pemahaman ini dapat memicu ketidakefektifan Komite Audit dalam menjalankan fungsinya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak terwujudnya kualitas penerapan prinsip-prinsip CG secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan keberadaan Komite Audit menjadi tidak optimal dan mendorong perusahaan membentuk Komite Audit semata-mata karena harus memenuhi peraturan CG semata (IKAI, 2002)

Perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada umumnya merupakan perusahaan yang telah memiliki struktur organisasi terpisah

antara pihak pemilik dan pengelolanya. Pemilik terdiri dari para pemegang saham dan stakeholder, sedangkan pihak pengelolanya terdiri dari pihak manajemen yang ditunjuk oleh pemilik untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Pengelolaan perusahaan di Indonesia yang listing di BEI dinilai belum efektif, hal tersebut dinyatakan oleh Kurniawan & Indriantoro (2000) dalam Nuraini 2010 bahwa penyebabnya adalah struktur kepemilikan perusahaan yang didominasi oleh keluarga, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengaturan perusahaan, menyebabkan manajemen perusahaan cenderung hanya berpihak pada salah satu pemilik saja.

Diantara berbagai macam sektor perusahaan yang *listing* di BEI, perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang diharapkan mempunyai prospek cerah dimasa yang akan datang karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia yang menjadikan sektor perusahaan manufaktur sebagai lahan paling strategis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi. Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2008, sektor perusahaan manufaktur merupakan jumlah emiten terbesar dibandingkan jumlah emiten yang listing di BEI yaitu sebesar 150 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika perdagangan di BEI.

Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan Komite Audit. Komite Audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan

mengawasi sistem pengendalian internal sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/MMBU/2002.

Mekanisme *corporate governance* yang terkait dengan Komite Audit meliputi banyak hal, seperti jumlah Komite Audit, independensi Komite Audit, aktivitas Komite Audit, dan expertise Komite Audit. Dengan adanya salah satu mekanisme Komite Audit ini, diharapkan dapat *memonitoring* para manajer perusahaan, agar dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan (Leonissa,2015).

Pentingnya Komite Audit dalam perusahaan dikemukakan oleh McMullen (1996), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan adanya Komite Audit akan mengalami kesalahan penyajian dan pelaporan keuangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit.

Keberadaan Komite Audit menjadi perhatian di banyak negara, seperti Indonesia. Pasca krisis tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan, seperti ketentuan pembentukan Komite Audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tanggal 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit. Peraturan mewajibkan perusahaan tercatat memiliki Komite Audit. Komite Audit harus beranggotakan tiga orang, salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah seorang anggota Komite Audit harus berasal dari Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua Komite Audit. Tugas Komite Audit berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan, karena Komite Audit diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas, yaitu mengawasi proses pelaporan

keuangan oleh manajemen. Klein (1998) mengemukakan bahwa karakteristik seperti ukuran, independensi, dan karakteristik lainnya dari Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin independen Komite Audit, kinerja perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan juga dikemukakan oleh Aanu (2014) bahwa Independensi Komite Audit itu penting dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan jika ukuran Komite Audit besar, maka fungsi pengawasandari Komite Audit terhadap akuntansi dan proses pelaporan keuangan akan meningkat, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, Yermack (1996) mengemukakan bahwa semakin besar jumlah dari Komite Audit akan memperlambat pengambilan keputusan karena akan banyak perdebatan diantara mereka, sehingga kinerja perusahaan akan menurun. Aldermen (2011) mengatakan bahwa ukuran Komite Audit bukanlah faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut didasari oleh temuan penelitiannya yang menyatakan bahwa meskipun perusahaan memiliki anggota Komite Audit dengan ukuran kecil, namun diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang keuangan (*financial expertise*), maka akan lebih baik dalam memberikan kontribusi lebih dalam peningkatan kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki anggota Komite Audit dengan ukuran besar, namun diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidang keuangan (*financial expertise*). Sehingga semakin baik Expertise Komite Audit maka akan semakin baik kinerja perusahaan.

Selain itu, aktivitas dari Komite Audit juga merupakan salah satu karakteristik dari Komite Audit. Menurut Al-Matari, Abdullah, dan Faudziah (2012), aktivitas Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kinerja perusahaan. Semakin banyaknya aktivitas (yang diukur dengan jumlah rapat) yang dilakukan oleh Komite Audit maka Komite Audit tersebut akan lebih dapat menjalankan tugasnya untuk mengontrol dan mengawasi pelaporan keuangan oleh manajemen (McMullen, 1996). Lebih lanjut, Siallagan dan Machfoedz (2006) mengemukakan bahwa keberadaan dan aktivitas Komite Audit dalam melakukan pengawasan baik terhadap operasional maupun proses penyusunan laporan keuangan merupakan tanda bagi investor bahwa perusahaan mempunyai CG yang baik sehingga merespon secara baik pula melalui peningkatan harga pasar saham perusahaan, yang mencerminkan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan melihat rasio profitabilitas (Prasinta, 2012). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset (ROA)* karena dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya (Prasinta, 2012). Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan CG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal (OECD, 2004). Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan oleh Al-Matari (2012), Shehata (2014),

Ziaul (2012), Afza (2014), Huang (2014), kinerja perusahaan diproksikan dengan ROA, ROE, dan Tobin's Q.

Berdasarkan kajian literatur empiris terdahulu (*previous studies*), penulis menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) yaitu pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap kinerja perusahaan masih bersifat ambigu atau belum konklusif. Dengan pengertian lain, sebagian peneliti menemukan bahwa karakteristik Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dan sebagian peneliti menemukan bahwa karakteristik Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Afza dan Nazir (2014), Al-Matari, Abdullah, dan Faudziah (2014), Aanu (2014), Amer (2014), Caylor (2006), Joanne (2008), Foyeke (2014), Ayemere (2015), Ghabayen (2012).

Dalam konteks penelitian empiris, apabila menggunakan analisis regresi linear, untuk menghindari bias dalam hasil regresi maka digunakan variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralsasi pengaruhnya (Sekaran, 2006). Jika tidak dikontrol variabel tersebut akan mempengaruhi gejala yang sedang dikaji. Peneliti harus menghilangkan atau menetralkan pengaruh yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Kriswanto, 2009). Berdasarkan pendapat tersebut, penulis mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol dimana ukuran perusahaan dan *leverage* pada penelitian sebelumnya pernah diuji sebagai variabel kontrol karakteristik Komite Audit terhadap kinerja perusahaan (Afza, 2014; Al-Matari, 2014; Amer, 2014; Ayemere, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan sangat beragam hasilnya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan?
2. Apakah independensi Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan?
3. Apakah aktivitas Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan?
4. Apakah Expertise Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai hubungan antara Komite Audit yang diukur dengan ukuran Komite Audit, independensi Komite Audit, aktivitas Komite Audit, dan expertise Komite Audit terhadap kinerja perusahaan, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah independensi Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah aktivitas Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan.

4. Untuk mengetahui apakah expertise Komite Audit memiliki pengaruh terhadap penentuan kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi kalangan akademisi yang hendak melakukan tinjauan mengenai faktor penentu dalam menilai perusahaan dari sudut pandang Komite Audit.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh Komite Audit yang diterapkan pada perusahaan manufaktur di Indonesia terhadap kinerja perusahaan.
3. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat mengembangkan penelitian terkait Komite Audit dan kinerja perusahaan dari literatur terdahulu dan hasil penelitian ini.

